

## Peninjauan Perencanaan Spasial dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengembangan Kota Tambang: Studi Kasus Kabupaten Musi Banyuasin

### *Spatial Planning and Governance Review in the Development of Mining City: A Case Study of Kabupaten Musi Banyuasin Regency*

Ferdianta Wahyu Nur Pratama,<sup>1\*</sup> Tristina Annisadina,<sup>1</sup> Bella Fernanda<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung, Indonesia

\*Corresponding Author: [ferdhanpratama@gmail.com](mailto:ferdhanpratama@gmail.com)

Submitted: October 22, 2024 | Accepted: November 26, 2024 | Publish: January 2, 2025

**Abstract:** *More than 50% of Musi Banyuasin Regency's gross regional product performance comes from coal mining, making it one of the districts in South Sumatra where mining business activities dominate. The transformation of Musi Banyuasin Regency into a mining city is a complex process, requiring the fulfillment of numerous factors to establish an environmentally sustainable mining city that enhances community quality and city welfare. The goal of this research is to examine the level of implementation of the mining town governance system by the Musi Banyuasin Government. The research employs a qualitative approach through a comprehensive examination of various planning documents in Musi Banyuasin Regency, highlighting the potential for mining sector activities. However, the incorporation of these activities into the regional development framework remains unclear. This condition presents numerous problems and challenges for the urban governance system, particularly in achieving sustainable development in the Musi Banyuasin Regency area.*

**Keywords:** *Mining City, Musi Banyuasin, Spatial Planning, Urban Governance*

**Abstrak:** Pertambangan batu bara berkontribusi lebih dari 50% terhadap performa produk domestik regional bruto Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana hal ini menempatkan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang digerakkan oleh kegiatan usaha pertambangan. Perwujudan Kabupaten Musi Banyuasin menjadi Kota Tambang tidak mudah, ada banyak faktor yang harus dipenuhi agar dapat tercipta kota tambang yang berkelanjutan secara lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem tata kelola kota tambang telah diterapkan oleh Pemerintah Musi Banyuasin. Dengan metode kualitatif berupa telaah mendalam pada beberapa dokumen perencanaan yang berlaku di Kabupaten Musi Banyuasin, pada dasarnya potensi kegiatan sektor pertambangan telah disebutkan, namun pengintegrasian kegiatan pertambangan dalam konsep pembangunan wilayah masih belum terdefinisikan dengan jelas. Kondisi ini menjadikan sistem tata kelola perkotaan yang digerakkan oleh kegiatan usaha pertambangan menghadapi banyak permasalahan dan tantangan, terutama dalam mewujudkan pembangunan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kota Tambang, Kabupaten Musi Banyuasin, Rencana Tata Ruang, Tata Kelola Perkotaan



## Pendahuluan

Batu bara merupakan salah satu penyumbang bauran energi primer terbesar di Indonesia, dengan target 30% terhadap sumber energi nasional pada tahun 2025 dengan total cadangan 22,6 miliar ton (Arinaldo & Adiatma, 2019). Secara nasional, Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi penyumbang komoditas tambang batu bara terbesar keempat setelah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, dengan nilai ekspor mencapai US\$219,81 juta pada tahun 2022 (Annur, 2022). Salah satu penghasil tambang batu bara di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan peta sebaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kementerian ESDM ([momi.minerba.esdm.go.id](http://momi.minerba.esdm.go.id)), sedikitnya tercatat 40 perusahaan tambang batu bara terdapat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin, sektor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 58,78% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin (Badan Pusat Statistik Musi Banyuasin, 2024). Kota-kota tambang merupakan tipe kota industri, faktor pembentuk utama kotanya adalah sektor industri pertambangan itu sendiri, industri tambang akan membentuk pola-pola konsentrasi tenaga kerja tambang, lingkungan permukiman pekerja, yang pada akhirnya akan membentuk tipologi fungsional perkotaan di sekitar atau di dekat lokasi tambang (Dvoryadkina & Jalilov, 2020).

Kota-kota tambang saat ini mengalami masa peralihan antara masa pertambangan kontemporer yang mengedepankan eksplorasi dan optimalisasi hasil tambang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan pada masa pembangunan keberlanjutan, yang mana bersamaan dengan proses eksplorasi tambang berakhir (Enriquez et al., 2022; Jiao et al., 2021). Keberadaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) batu bara dan tambang lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin juga memberikan dampak terhadap keberlanjutan ekosistem jasa lingkungan. Pertambangan batu bara memiliki dampak yang sangat buruk bagi degradasi lingkungan dan lahan, dampak ini akan dapat dirasakan bahkan hingga bertahun-tahun pasca tambang. PETI pada satu sisi memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, namun dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada nilai manfaat yang ditimbulkan (Buli et al., 2018). Enriquez et al. (2022) menyebutkan di samping tantangan keberlanjutan lingkungan, kelembagaan pengelolaan kota tambang juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan.

Dari sini, dapat diketahui bahwa selain menjadi salah satu produsen batu bara terbesar di Sumatera Selatan dan membangun postur ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin, potensi sektor ini juga menghadapi tantangan dalam menguraikan sistem tata kelola perkotaan tambang yang rumit. Berbeda dengan studi yang dilakukan sebelumnya oleh (Dvoryadkina & Jalilov, 2020) yang mengidentifikasi aktivitas utama pembentuk suatu kota tambang, penelitian ini akan menggali secara lebih komprehensif, bagaimana penerapan konsep tata kelola tambang yang berkelanjutan dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, melalui penilaian pada enam komponen tata kelola perkotaan, yang terdiri dari (i) Analisis Tata Kelola Perkotaan Kabupaten Musi Banyuasin, (ii) Analisis Tata Kelola Perkotaan Kabupaten Musi

Banyuasin terhadap Isu Pembangunan Kota, (iii) Analisis Penatagunaan Lahan Kabupaten Musi Banyuasin, (iv) Analisis Penyediaan Infrastruktur Penunjang Kota Tambang, (v) Analisis Sistem Institusional, dan (vi) Analisis Pengelolaan Sistem Keruangan.

### **Metode Penelitian**

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penulisan artikel ini dengan pendekatan analisis dokumen untuk mengumpulkan sejumlah data empiris yang berisi informasi mendalam terkait praktik tata kelola perkotaan di Kabupaten Musi Banyuasin (Bowen, 2009). Penelitian kualitatif umumnya bersifat holistik dan melibatkan proses pengumpulan banyak data dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam atas apa yang diteliti (Nassaji, 2015). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laman pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, yang memuat dokumen perencanaan spasial seperti rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, serta dokumen perencanaan pembangunan yang berupa dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen-dokumen yang digunakan ini adalah dokumen yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah dan masih berlaku hingga tulisan ini disusun. Selain itu, data-data terkait juga dihimpun dari dokumen statistik, peraturan perundang-undangan, buku dan penelitian terkait tata kelola perkotaan, serta media massa berita sebagai penunjang data. Melalui telaah dokumen ini akan diperoleh kondisi bagaimana enam komponen pembentuk tata kelola perkotaan di Kabupaten Musi Banyuasin berjalan, untuk kemudian dapat dirumuskan serangkaian kebijakan pembangunan yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam perkembangan dan pembangunan wilayah ke depannya.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kajian mengenai tata kelola perkotaan dalam mewujudkan Kota Tambang di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat melalui 6 (enam) komponen analisis, di antaranya adalah (i) Analisis Tata Kelola Perkotaan Kabupaten Musi Banyuasin, (ii) Analisis Tata Kelola Perkotaan Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Isu Pembangunan Kota, (iii) Analisis Penatagunaan Lahan Kabupaten Musi Banyuasin, (iv) Analisis Penyediaan Infrastruktur Penunjang Kota Tambang, (v) Analisis Sistem Institusional, dan (vi) Analisis Pengelolaan Sistem Keruangan.

#### **Analisis Tata Kelola Perkotaan Kabupaten Musi Banyuasin**

Sistem tata kelola pemerintahan dalam tata kelola perkotaan mengacu pada bagaimana pemerintah (lokal, regional, dan nasional) dan pemangku kepentingan lainnya menentukan perencanaan dan mengatur perkembangan suatu kawasan perkotaan (Avis, 2016). Sektor ekonomi tertentu memainkan peran dalam menentukan arah perkembangan kota, seperti kota tambang atau *mining city*, yang secara sederhana merupakan suatu kota yang perkembangannya didominasi oleh kegiatan pertambangan dan kegiatan industri primer yang meliputi kegiatan ekstraksi dan pengolahan mineral dan bahan geologi atau hasil tambang lainnya, secara khusus dapat pula disebutkan bahwa kota tambang terbentuk akibat adanya

“komunitas tambang” berupa permukiman yang terletak berdekatan dengan lokasi tambang dan menjadi tempat tinggal sebagian besar pekerja tambang (Martinez-Fernandez et al., 2012). Tata kelola perkotaan yang holistik memainkan peran dalam membentuk fisik dan karakter sosial masyarakat kota, menentukan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, serta pendistribusian sumber daya (Avis, 2016). Dewasa ini, terjadi pergeseran kerangka tata kelola pemerintahan dalam melihat arah perkembangan dan pertumbuhan kota guna mengelola ketidakpastian dan kompleksitas (lingkungan, sosial, dan ekonomi) kota, di samping upaya dalam menciptakan stabilitas masyarakat kota (Baud et al., 2021).

Keberhasilan dalam penyelenggaraan kota tambang dapat dilihat dari bagaimana respons pemerintah terhadap keberadaan usaha pertambangan dan kontribusi sektor pertambangan terhadap arah perkembangan dan pembangunan kota (Muhirwa et al., 2023; Syahrir et al., 2020). Perkembangan sektor pertambangan seharusnya disikapi oleh pemerintah setempat agar kegiatan pertambangan berlangsung sesuai dengan rencana spasial dan rencana pembangunan kota ke depannya, dan tidak memberikan dampak yang merusak lingkungan secara luas (Shang et al., 2022; Syahrir et al., 2020). Hal ini dapat merujuk pada substansi di dokumen perencanaan spasial dan perencanaan pembangunan suatu kota. Sebagai wilayah yang perekonomiannya bergantung pada kegiatan usaha pertambangan, seharusnya dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin dapat mengakomodir aspek pertambangan. Telaah mengenai bagaimana respons pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Kesesuaian Dokumen RPJM dengan Penyelenggaraan Kota Tambang

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kesesuaian Indikator Penyelenggaraan Kota Tambang
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif, dan bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</li> <li>- Meningkatnya kualitas pelayanan publik</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik menuju smart city</li> </ul>	Tidak ada strategi yang dapat menunjang penyelenggaraan kota tambang
2.	Memacu Pembangunan Infrastruktur Secara Masif	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya infrastruktur yang baik dan merata</li> </ul>	Tidak ada strategi yang dapat menunjang penyelenggaraan kota tambang
3.	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi,	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya PAD</li> </ul>	a. Pada poin meningkatnya PAD sasaran yang akan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kesesuaian Indikator Penyelenggaraan Kota Tambang
	Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan	pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan produktivitas daerah melalui pemberdayaan koperasi</li> <li>- Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan</li> <li>- Mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah</li> <li>- Meningkatnya kesempatan kerja</li> </ul>	<p>dicapai dalam RPJMD 2017-2022 adalah meningkatkan PAD yang bersumber dari usaha pertambangan</p> <p>b. Pada poin mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD 2017-2022 adalah mendorong investasi industri pengolah SDA, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi)</p>
		Menurunkan angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya angka kemiskinan</li> </ul>	Tidak ada strategi yang dapat menunjang penyelenggaraan kota tambang
4.	Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul, dan Kompetitif	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan</li> <li>- Meningkatnya mutu pendidikan</li> <li>- Meningkatnya jangkauan kesehatan pada masyarakat</li> <li>- Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat</li> </ul>	Tidak ada strategi yang dapat menunjang penyelenggaraan kota tambang
5.	Menciptakan Generasi Muda Kabupaten Musi Banyuasin yang Religius, Berprestasi serta Anti Narkoba	Meningkatkan prestasi generasi muda Kabupaten Musi Banyuasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan prestasi generasi muda</li> <li>- Terbentuknya karakter generasi muda yang religius</li> <li>- Menurunnya kasus narkoba pada generasi muda</li> </ul>	Tidak ada strategi yang dapat menunjang penyelenggaraan kota tambang

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kesesuaian Indikator Penyelenggaraan Kota Tambang
6.	Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	- Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Tidak ada strategi yang dapat menunjang penyelenggaraan kota tambang
7.	Memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang disabilitas	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak - Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Tidak ada strategi yang dapat menunjang penyelenggaraan kota tambang
		Meningkatkan kemandirian PMKS	- Menurunkannya jumlah penyandang kesejahteraan sosial	Tidak ada strategi yang dapat menunjang penyelenggaraan kota tambang

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tinjauan pada dokumen perencanaan pembangunan RPJM, dapat diketahui bahwasanya perencanaan pembangunan yang didasarkan pada aktivitas tambang tidak banyak diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini menjadi tantangan bagi daerah dengan kontribusi sektor pertambangan yang tinggi, namun tidak dapat menjadikan pembangunan wilayah untuk menyelaraskan pembangunan berdasarkan keunggulan komparatif daerah (Maponga & Musa, 2021). Menyikapi perkembangan sektor pertambangan yang pesat seharusnya pemerintah dapat melakukan pengelolaan ruang yang mengedepankan aspek pengelolaan lingkungan hidup, lembaga pengelola lingkungan hidup, serta peran aktif masyarakat (Marfungah et al., 2024). Selain meninjau dokumen rencana pembangunan, penyelenggaraan kota tambang Kabupaten Musi Banyuasin juga melihat dokumen rencana spasialnya. Dokumen perencanaan spasial Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 yang dalam tujuannya telah mencantumkan sektor pertambangan sebagai pembentuk perekonomian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin melalui pengelolaan tambang berkelanjutan.

Kegiatan pertambangan telah banyak disebutkan dalam dokumen perencanaan spasial, tidak seperti pada temuan di dokumen perencanaan pembangunan. Diperlukan sinkronisasi antara kedua dokumen perencanaan ini, agar program-program pembangunan terutamanya yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha pertambangan dapat diakomodasi dalam

dokumen perencanaan pembangunan, hingga akhirnya dapat dilakukan penganggaran pada program-program tersebut.

Tabel 2. Analisis Sistem Tata Kelola Pemerintahan Internal Musi

Komponen	Kosep Utama	Perumusan Agenda Ke Depan	Aktor Kunci dan Penunjang
<i>Planning formulation</i>	Rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang saling terintegrasi dan dapat mengakomodir keberadaan sektor pertambangan dan galian sebagai penggerak ekonomi utama kota	- Memasukkan indikator kota tambang dan pengelolaan kawasan tambang berkelanjutan dalam dokumen perencanaan spasial dan pembangunan	- Pemerintah Daerah sebagai penyusun dokumen rencana - Swasta (pengusaha industri tambang) - Pelibatan kelompok masyarakat dalam penyusunan dokumen rencana
<i>Planning implementation</i>	Implementasi rencana dalam bentuk rencana kerja OPD	- Pengarusutamaan indikator kota tambang berkelanjutan dalam perencanaan spasial dan pembangunan	- Bappeda - Dinas PUPR - Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup - Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan
<i>Planning control, reporting, and monitoring</i>	Monitoring dan evaluasi terhadap rencana	- monitoring dan evaluasi ruang tambang pada saat eksplorasi dan pasca-tambang	- Dinas PUPR - Dinas PMPTSP

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Kegiatan usaha pertambangan secara tidak langsung memberikan dampak bagi pembangunan di wilayah sebagai akibat adanya perubahan bentang lahan, kondisi fisik lingkungan, kerusakan prasarana akibat aktivitas transportasi tambang, dan sebagainya (Enriquez et al., 2022). Diperlukan tata kelola pertambangan yang baik, untuk dapat menciptakan sistem kota tambang yang berkelanjutan (Shang et al., 2022). Meskipun pada kondisi di lapangan, akan sulit untuk menciptakan sistem tata kelola pertambangan yang baik, seperti salah satu hambatan dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah tidak adanya modal sosial yang kuat antara masyarakat dengan pemerintah, diperlukan sinergitas kebijakan publik antara pemerintah dan masyarakat di sekitar kawasan tambang untuk menjamin keberlanjutan sistem tata kelola kota tambang di Kabupaten Musi Banyuasin (Enriquez et al., 2022). Komponen *planning formulation*, *planning implementation*, dan *planning control, reporting, and monitoring* sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2 berusaha mengelaborasi sistem tata kelola pertambangan ke dalam dokumen perencanaan spasial ataupun pembangunan yang memerlukan koordinasi yang kuat tidak hanya dalam lingkup pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetapi juga dengan pemilik perusahaan tambang dan kelompok masyarakat.

### Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Isu Pembangunan Kota

Diperlukan sebuah kerangka kerja yang dapat menjelaskan perkembangan bentuk suatu kota, tentang apa yang dimiliki oleh suatu kota untuk berkembang, salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan “*problematize urbanization*”. Pendekatan ini mempelajari sejarah dan dinamika perkembangan kota menjadi lebih terlokalisasi dan memperhitungkan variabilitas yang ada dalam suatu kota (McHale et al., 2015). Perkembangan kota akan semakin berkembang ke arah luar dan mengaburkan batas-batas administrasi dan ciri perkotaan, menimbulkan fragmentasi sosial, tantangan ekonomi dan ancaman lingkungan, serta isu *sustainability* menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan suatu kota (Marques & Alvim, 2024; Wang et al., 2023; Zhou et al., 2024). Menilai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kota tambang dapat dilihat dari bagaimana kinerja sektor pembentuk perekonomian kotanya. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk oleh sektor usaha pertambangan dan penggalian sebesar lebih dari 50% PDRB total. Untuk mengetahui kinerja sektor ini secara regional di Provinsi Sumatera Selatan, maka dilakukan analisis *Location Quotien* untuk mengetahui sektor basis provinsi yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin (Tabel 3). Analisis *Location Quotien* digunakan dengan membandingkan kinerja ekonomi suatu wilayah dengan nilai kinerja ekonomi wilayah yang lebih luas atau di atasnya. Nilai analisis *Location Quotien* kurang dari 1 menunjukkan suatu sektor bukan merupakan sektor basis, dan nilai *Location Quotien* lebih dari 1 menunjukkan sektor tersebut merupakan sektor basis jika dilihat dari wilayah makro atau yang lebih luas (Morrissey, 2016).

Tabel 3. Penilaian Sektor Basis Perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin dengan LQ

Sektor	PDRB Kabupaten	PDRB Provinsi Sumatera Selatan	LQ	Keterangan
Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan	6.124,83	54.834,53	0,785	Non basis
Pertambangan dan penggalian	27.115,26	72.065,27	2,646	Basis
Industri pengolahan	3.580,99	60.571,42	0,415	Non basis
Listrik, gas dan air bersih	13,10	417,84	0,220	Non basis
Air bersih, sampah, dan limbah	6,99	363,22	0,135	Non basis
Konstruksi	3.216,27	36.671,66	0,616	Non basis
Perdagangan, hotel, restoran	1.495,77	33.035,24	0,318	Non basis
Transportasi	101,38	5.984,55	0,119	Non basis
Akomodasi dan makan minum	55,61	4.556,74	0,085	Non basis
Informasi dan komunikasi	137,50	12.951,75	0,074	Non basis
Jasa keuangan dan asuransi	813,94	7790,89	0,734	Non basis
Real estate	773,32	10.807,86	0,503	Non basis
Jasa perusahaan	14,97	360,30	0,292	Non basis
Administrasi pemerintahan	1.380,82	10.260,46	0,946	Non basis
Jasa pendidikan	872,19	8.613,70	0,712	Non basis
Jasa kesehatan	159,06	2.400,14	0,466	Non basis
Jasa lainnya	267,63	2.725,73	0,690	Non basis
<b>JUMLAH</b>	<b>46.129,63</b>	<b>324.411,30</b>		

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Selain kinerja sektor pembentuk PDRB, tantangan lainnya yang dihadapi oleh Kabupaten Musi Banyuasin adalah tingginya tingkat kemiskinan, di mana sampai tahun 2022 persentase penduduk miskin Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 15,19%. Angka ini berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan yang berada di kisaran 11,9% (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2024, Badan Pusat Statistik Musi Banyuasin, 2024). Kemiskinan juga erat kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia, di mana nilai IPM Kabupaten Musi Banyuasin bernilai 68,6. Nilai ini berada di bawah nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan yang berada pada 70,90. Tabel 4 menunjukkan bagaimana sistem tata kelola Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengelola potensi dan tantangan yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 4. Analisis Tata Kelola terhadap Isu Pembangunan Kota

Komponen	Konsep Utama	Perumusan Agenda Ke Depan	Aktor Kunci dan Penunjang
<i>Economic Base</i>	Pemanfaatan sektor pertambangan dan penggalian untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk	- Penciptaan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan pada sektor tambang dan ekonomi unggulan lainnya	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan - Kelompok masyarakat - Pengusaha Pertambangan
<i>Institutional Base</i>	perencanaan partisipatif menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui berbagai konsep pembangunannya	- Mengoptimalkan kerja sama untuk meningkatkan kinerja tambang dan kesejahteraan masyarakat.	- Bappeda - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan - Kelompok masyarakat - Pengusaha Pertambangan

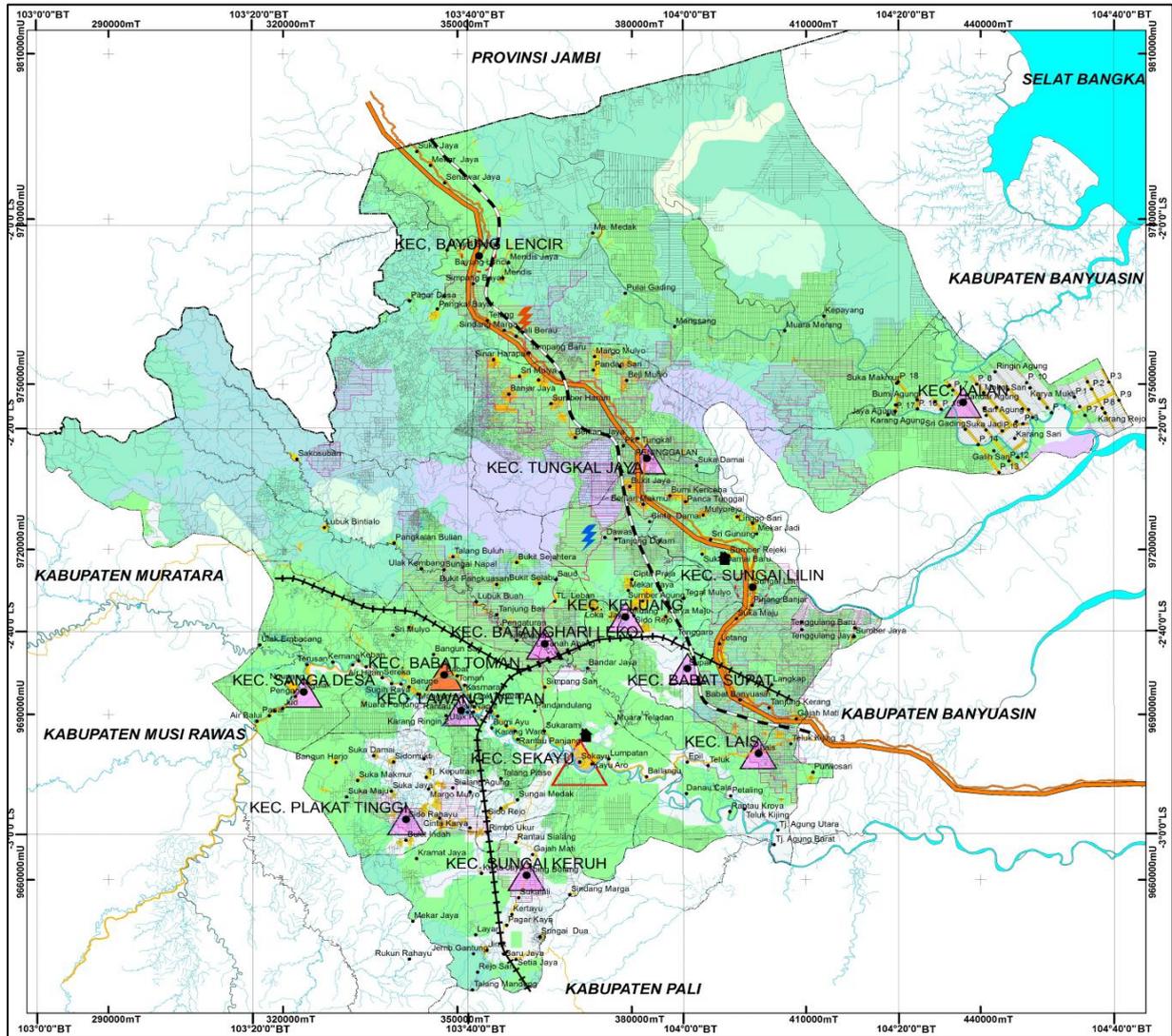
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Pengembangan tata kelola perkotaan tambang yang berusaha menciptakan pengembangan wilayah didasarkan pada ekonomi basis yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif bagi Kabupaten Musi Banyuasin. Elaborasi antara komponen pertama (*planning based*) dan komponen kedua (*economic based*) akan berpengaruh banyak pada bagaimana penatagunaan lahan Kabupaten Musi Banyuasin direncanakan ke depannya yang akan diulas pada poin selanjutnya.

### Analisis Penatagunaan Lahan Kabupaten Musi Banyuasin

Karena pengaruh kepadatan penduduk di pusat kota terhadap penyediaan fasilitas pelayanan lokal, jarak rata-rata dari tempat tinggal ke fasilitas pelayanan lokal ini biasanya akan lebih pendek di bagian pusat kota daripada di pinggiran kota (umumnya penduduk di luar pusat kota cenderung tidak padat). Dengan demikian, penduduk di bagian pusat kota dapat diperkirakan melakukan perjalanan harian yang lebih pendek daripada penduduk di

luar kota inti, baik ke fasilitas lokal maupun fasilitas khusus (Hummel, 2020). Semakin tinggi kepadatan penduduk kota secara keseluruhan, semakin rendah jarak rata-rata antara tempat tinggal dengan pusat kota (Angel et al., 2020). Dengan demikian, kepadatan penduduk secara tidak langsung mempengaruhi variabel struktur kota berkaitan perkembangan pusat-pusat kota yang semakin masif dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya (Lu et al., 2023). Penatagunaan lahan kota akan erat kaitannya dengan bagaimana pemerintah dapat menyediakan ruang untuk kegiatan publik atau yang disebut dengan ruang publik.



Gambar 1. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin  
 Sumber: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Guna menjamin keberlanjutan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan, dalam dokumen rencana tata ruang disebutkan beberapa Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Tambang, mulai dari pertambangan yang harus dilengkapi dengan dokumen perizinan, upaya rehabilitasi berupa reklamasi dan revitalisasi pasca tambang, pembatasan permukiman di sekitar kawasan tambang, hingga upaya-upaya lestari untuk menjaga keberlanjutan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga telah memiliki RDTR Kawasan Perkotaan Babat Toman dan RDTR Kawasan Perkotaan Bayung Lencir melalui

penetapan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 dan Nomor 8 Tahun 2023. Pada kedua kawasan perkotaan ini, diharapkan dapat menjadi perkembangan wilayah perkotaan baru di Kabupaten Musi Banyuasin, menjadi koridor mandiri, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang optimal. Kawasan Perkotaan Babat Toman memiliki luas 1.840,28 Hektar, sedangkan Kawasan Perkotaan Bayung Lencir memiliki luas 4.011,65 Hektar. Kabupaten Musi Banyuasin juga merencanakan pengembangan Kawasan Industri Hijau yang bekerja sama dengan PT Bina Karya Persero berbasis ekonomi sirkuler. Salah satu lokasi potensial yang akan menjadi Kawasan Industri Hijau-Berbasis Ekonomi Sirkuler ini adalah di lokasi eks lahan tambang PT Bara Mutiara Prima di Desa Cinta Damai, Kecamatan Sungai Lilin (Redaksi Sawit Indonesia, 2022).

Salah satu permasalahan dan tantangan penyelenggaraan kota tambang di Kabupaten Musi Banyuasin adalah masih adanya pertambangan tanpa izin (PETI). Menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan penertiban pemanfaatan ruang pertambangan liar, termasuk di dalamnya menjamin kegiatan pasca tambang pada pertambangan liar ini (Adu-Baffour et al., 2021; Pagouni et al., 2024). Tantangan lainnya adalah bagaimana keberadaan kawasan tambang baik kawasan tambang berizin resmi ataupun kawasan tambang tak berizin menjadi magnet baru dalam perkembangan kawasan yang berdampak pada perubahan pola penggunaan lahan (Pagouni et al., 2024). Akan banyak sekali ditemui kantong-kantong permukiman warga ataupun pekerja tambang yang berada di dekat kawasan tambang, membentuk permukiman baru (Dányi, 2015; Gough et al., 2019) mengikuti jaringan jalan dan akan meningkatkan kemungkinan terjadinya *urban sprawl* yang semakin meluas, menjauhi kawasan kota inti (Gough et al., 2019; Rubbers, 2019).

Tabel 5. Analisis Penatagunaan Lahan Kabupaten Musi Banyuasin

Komponen	Konsep Utama	Perumusan Agenda Ke Depan	Aktor Kunci dan Penunjang
<i>Land development process</i>	Pengembangan kawasan perkotaan baru di WP Babat Toman dan Bayung Lencir	- Penciptaan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan pada sektor tambang dan sektor-sektor ekonomi unggulan lainnya	- Dinas PUPR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan - Kelompok masyarakat - Pengusaha Pertambangan
	Pemanfaatan lahan pasca tambang batu bara untuk kawasan perindustrian	- Pengembangan kawasan industri hijau berbasis ekonomi sirkuler di lahan bekas tambang PT Bara Mutiara Prima	- Bappeda - Dinas PUPR - Dinas PMPTSP - BUMN - Swasta
<i>Institutional Base</i>	Pembangunan partisipatif memenuhi aspirasi masyarakat melalui berbagai konsep.	- Bermitra untuk mengoptimalkan tambang dan meningkatkan kesejahteraan.	- Bappeda - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan - Masyarakat dan Swasta

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Pada konteks penggunaan lahan yang terintegrasi dengan kebutuhan ruang untuk kegiatan usaha pertambangan, diperlukan sebuah kerangka perencanaan tata ruang di sekitar lokasi tambang. Hal ini dapat menjamin keberlanjutan ekosistem usaha tambang dan dapat mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar lokasi tambang agar tidak terjadi perkembangan permukiman-permukiman informal baru sebagai akibat dari pemanfaatan ruang untuk aktivitas tambang. Keberadaan pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal menjadikan konflik penataan ruang di banyak wilayah tambang menjadi semakin rumit. Alih fungsi hutan rakyat atau kawasan perkebunan menjadi kawasan tambang semakin sering terjadi. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang ilegal ini tidak dapat dihiraukan, lubang galian bekas tambang akan banyak ditemukan di Kabupaten Musi Banyuasin dan terbengkalai pasca kegiatan tambang berakhir. Lubang ini akan berisi air di saat musim hujan dan akan meluap ke sungai-sungai yang akan menyebabkan air sungai menjadi asam sebagai akibat bercampurnya sisa-sisa galian tambang (Buli et al., 2018).

### **Analisis Penyediaan Infrastruktur Penunjang Kota Tambang**

Energi, air, layanan publik, bangunan dan rumah, mobilitas, teknologi informasi dan komunikasi adalah bagian dari struktur penting kota. Semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga kota. Masing-masing sektor ini menghadapi tantangan yang sama dalam menyeimbangkan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sedangkan pasokan yang tersedia terbatas (El-Sherif, 2020). Dalam perspektif keberlanjutan, kesadaran, dan tanggung jawab lingkungan yang tinggi sangat diharapkan, di samping sistem tata kelola perkotaan yang baik dalam menciptakan *platform* yang menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda utama pembangunan di tengah proses perkembangan kota yang semakin meluas ke daerah-daerah pinggirannya (Lu et al., 2023). Sistem mobilitas bukan lagi hanya sekedar salah satu bentuk penggunaan lahan, pola jaringan jalan sangat berkaitan dengan bagaimana pola pergerakan dan tipologi suatu kota terbentuk berdasarkan konektivitas rute pergerakan dan mobilisasi yang dilakukan oleh masyarakat (Badach et al., 2018; Domaradzka, 2018). Konsep sistem mobilitas yang berkelanjutan telah bergeser kepada upaya yang *“demand-oriented”* melalui peningkatan intensitas masyarakat untuk berjalan kaki dan bersepeda, serta pengurangan kebutuhan untuk bepergian. Sistem mobilitas berkelanjutan juga menjadi salah satu strategi jangka panjang yang dapat diterapkan untuk mengurangi konsekuensi negatif transportasi terhadap kesehatan dan lingkungan dari mobilitas itu sendiri (El-Sherif, 2020).

Penyelenggaraan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan dokumen perencanaan pembangunannya, yang menjadi program prioritas yang akan dilaksanakan, di antaranya adalah (1) Perbaikan infrastruktur jalan rusak; (2) Penyediaan listrik dan optimalisasi transmisi ke daerah pelosok; dan (3) Penyediaan air bersih untuk masyarakat. Penyediaan prasarana jalan Kabupaten Musi Banyuasin dalam kondisi baik pada tahun 2016 hanya sejumlah 48,6% atau sepanjang 528,25 Km. Penyelenggaraan infrastruktur kota tambang berkaitan dengan kapasitas jalan yang tidak mampu menampung beban yang

melebihi tonase dalam mobilisasi komoditas hasil tambang yang menyebabkan jalan akan terus mengalami kerusakan setiap tahunnya (Agboola et al., 2020). Pengangkutan hasil tambang juga mengakibatkan pencemaran udara bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang jalan menuju lokasi tambang atau di dekat lokasi tambang (Entwistle et al., 2019). Keberadaan Sungai Musi dan Sungai Dawas yang menjadi sumber air bersih masyarakat juga kerap kali mengalami pencemaran akibat aktivitas tambang batu bara (Hadi, 2023; Nefri, 2023; Teguh, 2023; Vinayagam et al., 2024).

Tabel 6. Penyediaan Infrastruktur Penunjang Kota Tambang Kabupaten Musi Banyuasin

Komponen	Konsep Utama	Perumusan Agenda Ke Depan	Aktor Kunci dan Penunjang
<i>The uniqueness of infrastructure, facilities and utilities</i>	Sungai Musi, <b>Sungai</b> Tenggaro dan dan Sungai Dawas menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat	- Normalisasi sungai	Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan
<i>Infrastructure and services deliveries</i>	Pembangunan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi kota	- Pembangunan jalan Tol Baleno sebagai PSN - Pembangunan Pelabuhan pengumpan di Sungai Lilin	Pemerintah Pusat guna menciptakan penguatan sektor ekonomi, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Analisis penyediaan infrastruktur penunjang sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6, merupakan komponen pendukung untuk menunjang rencana penggunaan lahan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya. Pada bagian ini melihat apakah ada infrastruktur alternatif yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dalam rangka pengembangan sektor pertambangan, pengembangan infrastruktur ini juga diupayakan dapat menunjang pelayanan dasar permukiman, baik yang berada di sekitar kawasan pertambangan ataupun di luar lokasi kawasan pertambangan. Pertumbuhan wilayah yang inklusif menjadi konsep pengembangan wilayah yang dapat memberikan peluang untuk semua aspek kewilayahan dapat berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin. Poin pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana sistem institusional atau tata kelola kelembagaan bekerja agar dapat menjalankan perencanaan kota tambang dengan lebih optimal.

### Analisis Sistem Institusional

Perkembangan perkotaan juga diikuti dengan perkembangan masyarakatnya, saat ini masyarakat kota telah bergeser dari masyarakat pasif menuju masyarakat yang aktif. Masyarakat memiliki kehendak untuk (i) meminta transparansi dari pemerintah; (ii) adanya dialog antara warga dan pemerintah; (iii) keterbukaan; (iv) kedekatan; serta (v) partisipasi dan keterlibatan warga (Hernandez 2021). Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pembangunan kota meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi

kebutuhan warga kota serta bertindak berdasarkan preferensi dan kebutuhan warga kota (Fakhimi, Khani and Sardroud 2021). Sistem institusional terkait dengan penyelenggaraan kota tambang di Kabupaten Musi Banyuasin akan berkaitan dengan adanya Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Musi Banyuasin. Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin tertuang dalam Keputusan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 68/KPTS-DPUPR/2022, yang terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas perkebunan
7. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
8. Kantor Pertanahan ATR/BPN
9. IAP
10. ASPI
11. Tokoh Masyarakat

FPR Kabupaten Musi Banyuasin dalam pelaksanaannya, juga memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang, memberikan pertimbangan teknis untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, penyelesaian sengketa penataan ruang, dan termasuk menjamin keterlibatan masyarakat dan publik dalam penyusunan rencana spasial, dan penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang. FPR merupakan salah satu bentuk kelembagaan formal yang dapat mengeluarkan rekomendasi tata ruang pada suatu izin pertambangan di Indonesia sejak berlakunya Undang-undang Cipta Kerja. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sudah secara otomatis ditentukan oleh Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) masing-masing komoditas tambang.

Berbicara mengenai sistem institusi pertambangan tidak dapat dilepaskan dari adanya kelembagaan informal tambang, kelembagaan inilah yang menjadikan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang liar masih tumbuh subur di Indonesia dan juga di Kabupaten Musi Banyuasin (Buli, Bakri and Febryano 2018). Alur sistem institusional penyelenggaraan PETI meskipun pertambangan ini adalah ilegal secara hukum, keterlibatan oknum-oknum seperti pemilik modal, pemilik lahan, hingga aparat keamanan memiliki andil yang cukup signifikan dalam jalannya operasional PETI (Buli, Bakri and Febryano 2018). Strategi yang baik membutuhkan pendekatan multi sektor memainkan peran yang tepat untuk memberdayakan masyarakat lokal (Enriquez, Veiga and Loureiro 2022). Kestabilan pendekatan multi sektor dalam mewujudkan kota tambang diwujudkan dengan pendekatan *good governance* menciptakan peluang bagi perusahaan lokal untuk melakukan diversifikasi dan berpartisipasi

dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 (Gankhuyag & Gregoire, 2018; Hiron, 2020; Shayan et al., 2022).

Tabel 7. Analisis Sistem Institusional Kabupaten Musi Banyuasin

Komponen	Konsep Utama	Perumusan Agenda Ke Depan	Aktor Kunci dan Penunjang
<i>Governance system</i>	Sistem pemerintahan harusnya mengedepankan partisipasi masyarakat, pemerintah melakukan audiensi dengan masyarakat dalam setiap penyusunan produk perencanaan	- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM untuk periode berikutnya	Kerja sama yang baik antar semua pemangku kebijakan sangat diperlukan dalam menjalankan pembangunan
<i>Community attachment and community participation</i>	Penyusunan perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang dapat melibatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam penentuan arah perkembangan dan pembangunan kota		
<i>Private sector involvement</i>	Sektor swasta dapat menjadi salah satu peluang dalam penyediaan sarana dan prasarana, penciptaan lapangan kerja, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi kota	- Dukungan dari pemerintah dalam menciptakan iklim berusaha yang kondusif dapat meningkatkan minat swasta atau privat sektor untuk terlibat dalam pembangunan	- Pemerintah memastikan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya - Keaktifan pemerintah dalam mendorong keterlibatan aktor di luar pemerintahan dan masyarakat
<i>Intercities/governance cooperations</i>	Kerja sama antara pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan Perkotaan Kabupaten Musi Banyuasin yang lebih mandiri	- Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Lintas Sumatera yang melalui Kabupaten Musi Banyuasin	Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah mutlak memerlukan sinergitas antar lembaga dalam mewujudkan penyelenggaraan kota tambang dan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Perkembangan perkotaan juga diikuti dengan perkembangan masyarakatnya, saat ini masyarakat kota telah bergeser dari masyarakat pasif menuju masyarakat yang aktif. Masyarakat memiliki kehendak untuk (i) meminta transparansi dari pemerintahan; (ii) pedagogi dalam hal ini adanya dialog antara warga dan pemerintah; (iii) keterbukaan; (iv) kedekatan; (v) partisipasi dan keterlibatan warga (Hernández, 2021). Terdapat beberapa istilah untuk partisipasi masyarakat dalam perancangan dan perencanaan kota, seperti

kolaboratif, komunikatif, deliberatif, dan perencanaan masyarakat. Apapun pendekatannya, pemahaman yang luas mengenai proses partisipatif perlu didorong sejak awal - yang tidak hanya terbatas pada pengumpulan atau penyebarluasan informasi mengenai pekerjaan pemerintah, tetapi juga mencakup dialog dengan pihak berwenang, pengambilan keputusan, dan penilaian dan evaluasi atas program yang dilakukan dan dikembangkan pemerintah (Mohanty & Kumar, 2021). Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pembangunan kota meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan warga kota serta bertindak berdasarkan preferensi dan kebutuhan warga kota sebagai suatu faktor penting dalam penciptaan infrastruktur cerdas (Fakhimi et al., 2021).

### Analisis Pengelolaan Sistem Keruangan

Guna memastikan sinergitas pertumbuhan daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan yang saling terkoneksi, perencanaan spasial bergeser kepada pendekatan yang lebih terintegrasi untuk mengatasi kompleksitas spasial hubungan perkotaan-pedesaan dan memaksimalkan hubungan dan konektivitas yang ada. Untuk mencapai tujuan ini, perencana kota perlu menyusun perencanaan spasial bersama dan pengambilan keputusan partisipatif yang memastikan koordinasi vertikal dan horizontal, memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dapat menjangkau semua pihak, dan konflik sumber daya dapat diminimalisir (UN Trade and Development, 2022). Dalam sistem ruang regional, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Sumatera Selatan di Kecamatan Sekayu. Beberapa kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin juga termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Banyu Lencir.

Tabel 8. Analisis Sistem Institusional Kabupaten Musi Banyuasin

Komponen	Konsep Utama	Perumusan Agenda Ke Depan	Aktor Kunci dan Penunjang
<i>Development/governance approaches: manage growth or compact cities style</i>	Maksimalisasi penggunaan lahan menjadi kunci untuk dapat menciptakan kota tambang yang lebih mandiri dan terintegrasi Penyediaan sistem transportasi umum yang bervariasi dan terintegrasi	- Pembangunan jalan tol lintas Sumatera - Pengembangan bus trans dan Pengembangan Zona Segitiga Emas	Kerja sama yang baik antar semua pemangku kebijakan sangat diperlukan dalam menjalankan pembangunan
<i>Internal (capacity building) and external factors (regional connectivities)</i>	Pemerataan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan di daerah-daerah yang kurang berkembang	- Pengembangan bus trans dan Pengembangan Zona Segitiga Emas - Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat	Kebijakan pembangunan yang inklusif secara nasional, dapat pemeratakan pembangunan di daerah-daerah terutama di luar kota inti dan daerah terpencil

Komponen	Konsep Utama	Perumusan Agenda Ke Depan	Aktor Kunci dan Penunjang
<i>Development focus (inner city or suburban development)</i>	Penciptaan layanan kota yang mendekati permukiman penduduk merupakan salah satu bentuk upaya menciptakan kota kompak dan meminimalisir jumlah pergerakan penduduk	Perencanaan kawasan hunian baru di pinggiran kota harus disertai pengembangan fasilitas layanan untuk menciptakan kota kompak dan mengurangi perjalanan bermotor	pembangunan pemerintah dalam mengupayakan pembangunan di kawasan sub urban yang adil, dan merata menjadi faktor kunci untuk menciptakan kawasan sub urban yang kompak

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Mengingat tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat utama untuk mencapai pembangunan dan keberlanjutan kota pertambangan, maka strategi perencanaan yang baik diperlukan untuk dapat menghasilkan sinergi positif maupun untuk menciptakan kelembagaan yang kuat dan kooperatif. Tata kelola yang baik dapat memberikan dampak yang baik bagi kota pertambangan, yang mana tingkat kesejahteraan sosio-ekonomi dan lingkungannya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan yang ada sebelum adanya pertambangan, tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem yang ada saat ini, dan meminimalisir jejak aktivitas di semua siklus pertambangan (Afkarina et al., 2019).

## Kesimpulan

Identifikasi pada dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan spasial, dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang menunjukkan bahwa meskipun pembahasan mengenai potensi tambang ataupun kegiatan pertambangan telah disebutkan, namun pengarusutamaan kegiatan pertambangan dalam perencanaan terlebih pada sistem tata kelola perkotaan Kabupaten Musi Banyuasin masih menunjukkan belum banyak menjadi fokus pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin ke depannya. Kabupaten Musi Banyuasin melalui peraturan perencanaan spasialnya telah memasukkan pola ruang tambang dan serangkaian peraturan yang mengikatnya. Namun, implementasi rencana spasial yang berkaitan dengan kawasan tambang sendiri masih terasa sukar untuk diterapkan di masyarakat. Kondisi ini juga diperburuk dengan adanya pertambangan liar atau PETI yang pada dasarnya nilai dampak yang ditimbulkan dapat jauh lebih besar dibandingkan nilai manfaatnya. Perkembangan kota tambang sangat erat kaitannya dengan tantangan untuk menciptakan wilayah tambang yang berkelanjutan. Penguatan kelembagaan atau *governance system* dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan komunitas dan tentunya sektor privat yang memiliki usaha pertambangan mutlak diperlukan dalam mewujudkan kota tambang yang berkelanjutan. Keaktifan pemerintah dalam mendorong keterlibatan aktor di luar pemerintahan dan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah mutlak memerlukan sinergitas antar lembaga dalam mewujudkan penyelenggaraan kota tambang dan pembangunan di Kabupaten Musi

Banyuasin. Sistem tata kelola yang baik akan menjembatani antara kepentingan aktivitas tambang dengan kepentingan-kepentingan lainnya, termasuk di dalamnya lingkungan, tata ruang, sosial masyarakat, eksistensi hutan lindung, ekonomi, infrastruktur penunjang, dan aspek-aspek lainnya. Serta memberikan dampak yang baik bagi perkembangan fisik kota di Kabupaten Musi Banyuasin yang terwujud melalui perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang baik dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pembentukan struktur dan pola ruang kota yang baik.

## Daftar Pustaka

- Adu-Baffour, F., Daum, T., & Birner, R. (2021). Governance challenges of small-scale gold mining in Ghana: Insights from a process net-map study. *Land Use Policy*, 102. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105271>
- Afkarina, K. I. I., Wardana, S., & Damayanti, P. (2019). Coal Mining Sector Contribution to Environmental Conditions and Human Development Index In East Kalimantan Province. *Journal of Environmental Science and Sustainable Development*, 2(2), 192–207. <https://doi.org/10.7454/jessd.v2i2.1025>
- Agboola, O., Babatunde, D. E., Isaac Fayomi, O. S., Sadiku, E. R., Popoola, P., Moropeng, L., Yahaya, A., & Mamudu, O. A. (2020). A review on the impact of mining operation: Monitoring, assessment and management. In *Results in Engineering* (Vol. 8). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2020.100181>
- Angel, S., Arango Franco, S., Liu, Y., & Blei, A. M. (2020). The shape compactness of urban footprints. *Progress in Planning*, 139. <https://doi.org/10.1016/j.progress.2018.12.001>
- Annur, C. M. (2022, October 18). *Daftar Provinsi Penghasil Ekspor Batu Bara Terbesar RI pada September 2022*. <https://databoks.katadata.co.id/index.php/perdagangan/statistik/a7e6441278fa00f/daftar-provinsi-penghasil-ekspor-batu-bara-terbesar-ri-pada-september-2022>
- Arinaldo, D., & Adiatma, J. (2019). *Dinamika Batu Bara Indonesia: Menuju Transisi Energi yang Adil*. *Institute for Essential Services Reform (IESR)*.
- Avis, W. R. (2016). *Urban governance (Topic Guide)*. [https://doi.org/https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/11/UrbanGov\\_GSDRC.pdf](https://doi.org/https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/11/UrbanGov_GSDRC.pdf)
- Badach, J. M., Stasiak, A., & Baranowski, A. (2018). The role of urban movements in the process of local spatial planning and the development of participation mechanism. *Miscellanea Geographica*, 22(4), 187–196. <https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0036>
- Badan Pusat Statistik Musi Banyuasin. (2024). *Musi Banyuasin dalam Angka 2023*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2024). *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2023*.
- Baud, I., Jameson, S., Peyroux, E., & Scott, D. (2021). The urban governance configuration: A conceptual framework for understanding complexity and enhancing transitions to

- greater sustainability in cities. *Geography Compass*, 15(5).  
<https://doi.org/10.1111/gec3.12562>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Buli, W., Bakri, S., & Febryano, I. G. (2018). Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3).
- Dányi, T. Z. (2015). The relationship between mining and segregated areas in pécs. *Pollack Periodica*, 10(2), 69–80. <https://doi.org/10.1556/606.2015.10.2.7>
- Domaradzka, A. (2018). Urban Social Movements and the Right to the City: An Introduction to the Special Issue on Urban Mobilization. *Voluntas*, 29(4), 607–620. <https://doi.org/10.1007/s11266-018-0030-y>
- Dvoryadkina, E., & Jalilov, E. (2020). Mining cities are a special type of cities of a traditionally industrial region. *E3S Web of Conferences*, 177. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017705022>
- El-Sherif, D. M. (2020). Urban mobility systems components. In *Solving Urban Infrastructure Problems Using Smart City Technologies: Handbook on Planning, Design, Development, and Regulation*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816816-5.00004-8>
- Enriquez, M. A., Veiga, M., & Loureiro, J. G. G. (2022). MINING CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. In *Routledge Handbook of the Extractive Industries and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.4324/9781003001317-28>
- Entwistle, J. A., Hursthouse, A. S., Marinho Reis, P. A., & Stewart, A. G. (2019). Metalliferous Mine Dust: Human Health Impacts and the Potential Determinants of Disease in Mining Communities. In *Current Pollution Reports* (Vol. 5, Issue 3, pp. 67–83). Springer. <https://doi.org/10.1007/s40726-019-00108-5>
- Fakhimi, A. H., Khani, A. H., & Sardroud, J. M. (2021). Smart-city infrastructure components. *Solving Urban Infrastructure Problems Using Smart City Technologies: Handbook on Planning, Design, Development, and Regulation*, 17–54. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816816-5.00002-4>
- Gankhuyag, U., & Gregoire, F. (2018). *Managing mining for sustainable development* (A. Quan, Ed.). UNDP and UN-Environment.
- Gough, K. V., Yankson, P. W. K., & Esson, J. (2019). Migration, housing and attachment in urban gold mining settlements. *Urban Studies*, 56(13), 2670–2687. <https://doi.org/10.1177/0042098018798536>
- Hadi. (2023). *Angkutan Batubara Diduga Jadi Penyebab Jalan Rusak*. May 03. Accessed December 16, 2023. <https://m.mediaindonesianews.com/main/hukum-dan-kriminal/10781/angkutan-batubara-diduga-jadi-penyebab-jalan-rusak>
- Hernández, C. A. (2021). The role of citizens in smart cities and urban infrastructures. *Solving Urban Infrastructure Problems Using Smart City Technologies: Handbook on Planning, Design, Development, and Regulation*, 213–234. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816816-5.00010-3>

- Hirons, M. (2020). How the Sustainable Development Goals risk undermining efforts to address environmental and social issues in the small-scale mining sector. In *Environmental Science and Policy* (Vol. 114, pp. 321–328). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.08.022>
- Hummel, D. (2020). The effects of population and housing density in urban areas on income in the United States. *Local Economy*, 35(1), 27–47. <https://doi.org/10.1177/0269094220903265>
- Jiao, W., Zhang, X., Li, C., & Guo, J. (2021). Sustainable transition of mining cities in China: Literature review and policy analysis. *Resources Policy*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101867>
- Lu, H., Shang, Z., Ruan, Y., & Jiang, L. (2023). Study on Urban Expansion and Population Density Changes Based on the Inverse S-Shaped Function. *Sustainability (Switzerland)*, 15(13). <https://doi.org/10.3390/su151310464>
- Maponga, O. P., & Musa, C. (2021). Domestication of the role of the mining sector in Southern Africa through local content requirements. *Extractive Industries and Society*, 8(1), 195–210. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.06.001>
- Marfungah, L., Safa'at, R., Istislam, ), Indah, ), & Qurbani, D. (2024). Implementing Spatial Planning Based on Environmental Sustainability in the Mining Area. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 3(4), 2118–2135. <https://ijhess.com/index.php/ijhess/>
- Marques, A. L., & Alvim, A. T. B. (2024). Metropolitan fringes as strategic areas for urban resilience and sustainable transitions: Insights from Barcelona Metropolitan Area. *Cities*, 150. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105018>
- Martinez-Fernandez, C., Wu, C. T., Schatz, L. K., Taira, N., & Vargas-Hernández, J. G. (2012). The Shrinking Mining City: Urban Dynamics and Contested Territory. *International Journal of Urban and Regional Research*, 36(2). <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01094.x>
- McHale, M. R., Pickett, S. T. A., Barbosa, O., Bunn, D. N., Cadenasso, M. L., Childers, D. L., Gartin, M., Hess, G. R., Iwaniec, D. M., McPhearson, T., Nils Peterson, M., Poole, A. K., Rivers, L., Shutters, S. T., & Zhou, W. (2015). The new global urban realm: Complex, connected, diffuse, and diverse social-ecological systems. *Sustainability (Switzerland)*, 7(5). <https://doi.org/10.3390/su7055211>
- Mohanty, R., & Kumar, B. P. (2021). Urbanization and smart cities. *Solving Urban Infrastructure Problems Using Smart City Technologies: Handbook on Planning, Design, Development, and Regulation*, 143–158. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816816-5.00007-3>
- Morrissey, K. (2016). A location quotient approach to producing regional production multipliers for the Irish economy. *Papers in Regional Science*, 95(3), 491–506. <https://doi.org/10.1111/pirs.12143>

- Muhirwa, F., Shen, L., Elshkaki, A., Hirwa, H., Umuziranenge, G., & Velepini, K. (2023). Linking large extractive industries to sustainable development of rural communities at mining sites in Africa: Challenges and pathways. *Resources Policy*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103322>
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. In *Language Teaching Research* (Vol. 19, Issue 2, pp. 129–132). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Nefri, I. (2023). *Kemarau Panjang, Polusi Udara dari Angkutan Batu Bara Ancam Kesehatan Warga Musi Banyuasin*. <https://www.liputan6.com/regional/read/5417257/kemarau-panjang-polusi-udara-dari-angkutan-batu-bara-ancam-kesehatan-warga-musi-banyuasin?page=2>.
- Pagouni, C., Pavloudakis, F., Kapageridis, I., & Yiannakou, A. (2024). Transitional and Post-Mining Land Uses: A Global Review of Regulatory Frameworks, Decision-Making Criteria, and Methods. In *Land* (Vol. 13, Issue 7). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/land13071051>
- Redaksi Sawit Indonesia. (2022, January 17). *Pemkab Muba Kejar Pembangunan Kawasan Industri Hijau*. <https://sawitindonesia.com/pemkab-muba-kejar-pembangunan-kawasan-industri-hijau/>
- Rubbers, B. (2019). Mining towns, enclaves and spaces: A genealogy of worker camps in the Congolese copperbelt. *Geoforum*, 98, 88–96. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.10.005>
- Shang, Y., Ye, X., Dong, L., Liu, S., Du, T., & Wang, G. (2022). Landscape Pattern Evolution in a Mining City: An Urban Life Cycle Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 14(14). <https://doi.org/10.3390/su14148492>
- Shayan, N. F., Mohabbati-Kalejahi, N., Alavi, S., & Zahed, M. A. (2022). Sustainable Development Goals (SDGs) as a Framework for Corporate Social Responsibility (CSR). *Sustainability (Switzerland)*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/su14031222>
- Syahrir, R., Wall, F., & Diallo, P. (2020). Socio-economic impacts and sustainability of mining, a case study of the historical tin mining in Singkep Island-Indonesia. *Extractive Industries and Society*, 7(4), 1525–1533. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.07.023>
- Teguh, S. (2023). *Kala Tambang Batubara 'Kuasai' Sumsel: Lingkungan Rusak, Hidup Warga Makin Susah*. <https://www.mongabay.co.id/2023/11/29/kala-tambang-batubara-kuasai-sumsel-lingkungan-rusak-hidup-warga-makin-susah/>.
- UN Trade and Development. (2022). *Science, technology and innovation for sustainable urban development in a post-pandemic world*.
- Vinayagam, S., Sathishkumar, K., Ayyamperumal, R., Natarajan, P. M., Ahmad, I., Saeed, M., Alabdallah, N. M., & Sundaram, T. (2024). Distribution and transport of contaminants in soil through mining processes and its environmental impact and health hazard assessment: A review of the prospective solutions. In *Environmental Research* (Vol. 240). Academic Press Inc. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.117473>

- Wang, G., Peng, W., Zhang, L., Xiang, J., Shi, J., & Wang, L. (2023). Quantifying urban expansion and its driving forces in Chengdu, western China. *Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science*, 26(4), 1057–1070. <https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2023.11.010>
- Zhou, L., Wei, L., López-Carr, D., Dang, X., Yuan, B., & Yuan, Z. (2024). Identification of irregular extension features and fragmented spatial governance within urban fringe areas. *Applied Geography*, 162. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2023.103172>